

WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PBB P2***TAXPAYERS AND PAYMENT COMPLIANCE OF PBB P2*****A. B. Setiawan, Y Rohmatiani**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor

E-mail : ade.budi.setiawan@unida.ac.idyevi.rohmatiani@unida.ac.id**ABSTRACT**

Tax compliance in paying taxes is a strategic position in terms of increased tax revenue, but for more than two years there are still taxpayers who are less adherent to the realization of tax payments so that the target is not reached. Factors influencing adherence among others are the level of income, taxes and control knowledge is the village clerk. Meode research is descriptive with a population of 250 532 Taxpayer and samples taken as many as 400 taxpayers. The analysis technique used is regression bergandan with instrument data using classic assumption test. Research results Indicate that the level of income, tax knowledge and control of the village clerk and simultaneous partial effect of compliance with tax payment in Bogor. The contribution of income level, knowledge of tax and villages reviewing official control of compliance with tax payment in the amount of 54.2 percent

Keywords: Land and Building Tax, Compliance, income level, tax knowledge, control officers village

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam hal peningkatan penerimaan pajak, akan tetapi selam dua tahun ini masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh terhadap pembayaran pajak sehingga target realisasi tidak tercapai. Faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut antara lain adalah tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan. Penelitian yang digunakan adalah meode deskriptif dengan populasi sebanyak 250.532 Wajib Pajak dan sampel yang diambil sebanyak 400 Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi bergandan dengan instrument data menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Kota Bogor. Besarnya kontribusi tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petuas kelurahan terhadap kepatuhan pembayaran PBB P2 yaitu sebesar 54,2 persen

Kata kunci: PBB, Kepatuhan, Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, kontrol petugas kelurahan

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam penyelenggaraan Negara mempunyai sumber penerimaan Negara untuk menjalankan pemerintahannya. Sumber penghasilan Negara menurut UU No 17 Th 2003 mengenai Keuangan Negara, pendapatan Negara dan hibah ialah seluruh pendapatan Negara yang berasal dari pendapatan pajak, penerimaan Negara non pajak, beserta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan dibanding dengan penerimaan non pajak. Hal ini diiringi dengan tingginya APBN setiap tahunnya sehingga membuat tugas DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Harus dengan usaha menjalankan upaya agar meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Penggunaan hasil dari pajak mencakup belanja pegawai serta untuk membiayai macam-macam objek pembangunan, contohnya jembatan, rumah sakit/puskesmas, sekolah, dst yang dibiayai menggunakan hasil dari pajak (pajak.go.id).

UU No. 28 TH 2007 pasal 1 mengenai ketentuan umum perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib untuk Negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa, dengan demikian tetap berlandaskan kepada Undang undang, dan tidak dapat balasan secara langsung dan dipakai untuk kepentingan Negara serta kemakmuran rakyatnya. Menurut Soemitro pajak ialah bayaran atau pungutan masyarakat untuk kas Negara berlandaskan undang-undang dan tidak memperoleh jasa imbang secara langsung yang bisa diperuntukan dan dipakai guna membayar pengeluaran umum Negara. PBB mempunyai nilai uang lebih sedikit jika kita bandingkan dengan jenis pajak lainnya, akan tetapi PBB memiliki dampak yang luas. Hal ini diakibatkan hasil pendapatan pemerintah yang berasal dari PBB selanjutnya dikembalikan untuk pengembangan wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah sekitar juga dapat mengelola pendapatan tersebut untuk kemudian dapat menjadikan daerahnya mencapai kesejahteraan. Penjelasan lainnya, PBB juga memiliki wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak sejenisnya,

pendapatan PBB tiap periode selalu bertambah serta mempunyai persentase lebih banyak dari pada persentase peningkatan pajak lain dan APBN (Suhardito dan Sudibiyi,1999). Kenaikan penerimaan PBB juga karena ada kesadaran untuk menyetor pajak.

Kepatuhan dari orang yang membayar pajak dibutuhkan demi kelancaran penarikan pajak. Begitu pun untuk penarikan PBB diharapkan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak ialah suatu kondisi agar wajib pajak melaksanakan seluruh tanggungan perpajakan dan menjalankan hak perpajakan. Namun pada kebenarannya yang berlangsung pemerintah mengalami kendala dalam pembayaran pajak diantaranya ialah PBB. Dalam *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak menjadikan salah satu kunci utama dalam mendukung keberhasilan pemungutan pajak.

Pajak perlu memperhatikan kapasitas orang dalam membayar, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi dengan tingkat pendapatan, dan untuk itu pajak harus dibayar waktu yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Soemitro,1987) dan juga Ancok dalam Siamanjuntak (2008), tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus ikhlas membayar pajak. Upaya dalam memberikan penerangan akan dirasa kurang jika hanya ceramah dan pidato tetapi harus dicari cara yang dapat membuat orang ingat dan bangga akan tugas membayar pajak. Ridwan (2005) menjelaskan bahwa pada institusi pemerintah sumber daya manusia disebut juga aparat, yaitu pegawai yang menjalankan tanggung jawab mengenai kelembagaan bagi seorang aparat pegawai yang telah diatur dalam tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya selain faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesadaran pembayaran PBB, sikap wajib pajak agar berperilaku benar atau tidak pun dilatarbelakangi oleh kontrol dari petugas kelurahan. Kontrol penagihan pajak yang dilaksanakan perangkat kelurahan bisa menjadikan tujuan yang melatarbelakangi sikap wajib pajak untuk bertindak patuh (Kartika, *et al*: 2016).

Pada Tahun 2013 PBB P2 mulai ditangani oleh pemkot Bogor. semenjak perpindahan PBB P2 menjadi Pajak Daerah, Pemerintah Kota Bogor mampu melaksanakan tujuan dari UU PRDB tersebut. Berdasarkan laporan target dan realisasi penerimaan PBB P2 kota Bogor diketahui bahwa untuk Th 2015 telah ditetapkan target penerimaan PBB P2 sebesar 81 Milyar rupiah, naik dari 69.5 Milyar pada tahun 2014 namun itu sudah termasuk denda dan tunggakan (Dispenda Kota Bogor). Proses implementasi pengalihan PBB P2 ternyata masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya penerimaan PBB perkecamatan di Kota Bogor tahun 2015 2016 dilihat pada tabel 1 berikut :

Kota Bogor	Tkt Pencapaian (2015)	Sisa pokok ketetapan	Tkt Pencapaian (2016)	Sisa pokok ketetapan
	71,7 %	28,3%	70,4%	29,6%

Sumber : Bapenda 2017

Berdasarkan data bahwa penerimaan PBB Kota Bogor per kecamatan dari tahun 2015-2016 belum tercapai target dan tingkat pencapaian, secara persentase terjadi penurunan meskipun secara jumlah terdapat kenaikan nilai. Tidak tercapainya target mengidentifikasi masih terdapat permasalahan untuk usaha tercapainya target tersebut. Mengingat PBB P2 sebagai pajak baru untuk daerah maka dalam pengelolaannya tentunya ada kendala yang harus ditangani oleh pemerintah khususnya Kota Bogor, dan terbukti masih banyaknya WP yang kurang patuh dalam membayar pajak

Tinjauan Pustaka Tingkat Pendapatan

Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan orang dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Oleh karena itu pajak dipungut pada waktu yang tepat, yaitu saat wajib pajak mempunyai uang (Soemitro, 1987:26)

Adapun pendapatan keluarga menurut Aisyen (2010) ialah sebagai bagian hal yang dipentingkan untuk menjalankan keuangan

keluarga, karena besarnya pendapatan yang dimiliki akan mempengaruhi berapa besar uang yang akan dikeluarkan. Penghasilan ialah gaji tetap yang didapatkan setiap bulan. Penghasilan mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan orang yang memenuhi kebutuhan gizi, perumahan yang sehat, pakaian dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang juga pengertian dari aturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku umum di Indonesia disarankan untuk dimiliki oleh semua wajib pajak. Dari adanya penjelasan yang benar mengenai pajak, diupayakan masyarakat agar meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan kewajibannya selaku warga Negara dengan membayar tepat waktu dan sesuai jumlah nominal yang seharusnya dibayarkan. Sebab itu, adanya fasilitas yang cukup untuk menunjang pengetahuan pajak dari wajib pajak menjadikan sesuatu hal yang diutamakan untuk catatan dalam pemahaman pajak. *Tax knowledge is an essential element in a voluntary compliance tax system* (Kasippilai, 2000 dalam Saad 2013), *particularly in determining an accurate tax liability* (Palil, 2005 dalam Saad 2013) dengan demikian, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi pembayaran pajak.

Kontrol Petugas

1. Definisi Kontrol Sosial

Kontrol pendapat para ahli :

- a. Peter I. Berger ialah bermacam strategi yang dipakai untuk mengatur orang yang menyalahi aturan.
- b. Roucek & Warren ialah proses yang tidak terencana untuk mengejar individu supaya dapat beradaptasi dengan kebiasaan dan nilai-nilai kelompok mereka mereka berada.
- c. Soejono Soekarno ialah suatu jalan baik yang sudah direncanakan atau tidak, yang memiliki maksud mengajak, membimbing bahkan memaksa sekelompok orang untuk

patuh terhadap nilai-nilai dan kaidah yang berlaku

Kepatuhan Membayar Pajak

Putri (2014) Kepatuhan wajib pajak akan perpajakan yakni perasaan yang muncul dari diri sendiri atas kewajibannya mematuhi pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur dorongan dari orang lain. Kepatuhan wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak agar mereka dengan senang hati membayar kewajibannya untuk digunakan sebagai manfaat dari perpajakan.

Kondisi negara ini tidak terlepas dari kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Apabila kesadaran akan bernegara dirasa kurang maka masyarakat akan kurang mengenal dan mengetahui pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, merasakan keamanan dan ketertiban, merasa mempunyai serta menjiwai berbagai kebudayaan lokal dan pada akhirnya apabila kesadaran akan mencintai negara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat dari pengeluaran pemerintah pun akan berkurang sehingga kepatuhan membayar pajak juga berkurang.

Pengembangan Hipotesis

$H_0: \beta_1, \beta_2 = 0$; Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan PBB.

$H_a: \beta_1, \beta_2 \neq 0$; Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan PBB

Pentingnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak mempengaruhi dalam kepatuhan membayar pajak, begitu pula tingkat pendapatan, menurut Aisyen (2010) besarnya uang yang masuk dapat mempengaruhi banyaknya uang yang dikeluarkan seseorang jadi, jika seseorang mempunyai pendapatan yang besar maka seharusnya wajib pajak patuh terhadap pembayaran PBB dan kontrol petugas kelurahan berperan penting dalam patuhnya

wajib pajak dalam membayai PBB, karena salah satu tujuan dari PBB yaitu untuk meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBN.

$H_0: \beta_1 = 0$ Tingkat pendapatan, secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan pembayaran PBB.

$H_a: \beta_1 \neq 0$ Tingkat pendapatan, secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB.

Pendapat Soemitro kemampuan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.

$H_0: \beta_3 = 0$ Pengetahuan Pajak, secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan pembayaran PBB.

$H_a: \beta_3 \neq 0$ Pengetahuan Pajak, secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB.

Variabel pengetahuan pajak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ancok bahwa secara teoritik untuk menumbuhkan sikap positif terhadap suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan, tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus dan ikhlas dalam membayar pajak.

$H_0: \beta_4 = 0$ Kontrol Petugas Kelurahan secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB

$H_a: \beta_4 \neq 0$ Kontrol Petugas Kelurahan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI No 1007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan provinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk seterusnya diserahkan

kepada organisasi dibawahnya untuk jalan mengoptimalkan penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu, peran kepala daerah sangat dibutuhkan keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini. Oleh karena itu, peran kelurahan berperan penting dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan pasca peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Tabel 2 Operasional Variabel

Variabel	Variabel	Indikator	Skala	No
Tingkat Pendapatan (X1)	Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (Soemitro : 1987)	1.Kemampuan pemenuhan kebutuhan	Ordinal	1-3
		2.Kemampuan untuk menabung	Ordinal	
Tingkat pengetahuan pajak (X2)	Pengetahuan atau pemahaman pajak wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan tata Cara perpajakan, Sistem Perpajak di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan (Siti Kurnia:2010)	1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	Ordinal	3-9
		2. Objek PBB	Ordinal	
		3. Subjek PBB	Ordinal	
		4. Penghitung PBB	Ordinal	
		5. Jatuh tempo pembayaran	Ordinal	
		6. Pengetahuan sanksi	Ordinal	
Kontrol petugas kelurahan (X3)	Pemerintah menerbitkan UU No 32 Thn 2004 yang disempurnakan oleh UU No 23 thn 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Landasan Yuridis bagi Pengembangan otonomi daerah di Indonesia Kebijakan Tersebut dituangkan kedalam (UU No 28 Thn 2009)	7. Melakukan sosialisasi	Ordinal	10-13
		8. Kontrol oleh petugas agar membayar sesuai tagihan	Ordinal	
		9. Pengukuran oleh petugas agar membayar tepat waktu	Ordinal	
		10. Melakukan tindakan	Ordinal	
kepatuhan pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam negara (Sri Putri:2014)	13. Mengisi dan melaporkan SPOP	Ordinal	14-20
		14. Membayar tepat waktu	Ordinal	
		15. Ketersediaan membayar	Ordinal	
		16. Tidak memiliki tunggakan	Ordinal	
		17. Kebenaran menghitung	Ordinal	
			Ordinal	
			Ordinal	

penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas terdiri dari tingkat pendapatan (X_1), pengetahuan pajak (X_2) dan

kontrol petugas kelurahan (X_3). Sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan pembayaran PBB P2 (Y) di Kota Bogor

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi untuk penelitian ini ialah Wajib Pajak orang pribadi atau badan PBB P2 di Kota Bogor. Rumus yang dipakai dalam mendapatkan sampel yaitu menggunakan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = pesentase kelonggaran ketidakpastian dengan tingkat kesalahan 5%

Berdasarkan rumus tersebut dapat ditentukan bahwa jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 400, dan untuk populasi berjumlah 250.532 jiwa yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor.

Pengujian Instrumen

skala likert merupakan skala yang bisa dipakai dalam mengukur sikap, pendapat, dan pandangan seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu, yang didata dari skala ordinal Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor.

Tabel 3 penilaian Kuesioner

Jawaban Responden	Bobot Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Pengelolaan data ordinal menjadi analisis regresi terlebih dahulu harus ditranformasikan ke bentuk data interval dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{banyaknya Kelas}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Setelah besarnya ditemukan, selanjutnya dibuat rentang skala agar dapat diketahui dimana rata-rata penilaian responden untuk setiap unsur diferensiasi dan seberapa jauh variasinya. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval tersebut diperoleh kriteria penelitian pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 4 Skala Penilaian

Skala	Interpresentasi
1,00 – 1,80	Sangat tidak setuju
1,81 – 2,60	Tidak setuju
2,61 – 3,40	Ragu-ragu
3,41- 4,20	Setuju
4,21 – 5,00	Sangat setuju

Sumber : Sugiyono, 2013

Pengujian Validitas

kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali,2006). Rumus yang digunakan adalah :

$$r_{hitung} = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X \Sigma Y)}{\sqrt{\{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{hitung} = koefisien validitas item yang dicari

n = Jumlah sampel

x = Skor pernyataan

Y = Skor total pernyataan

Σx = Jumlah skor dalam distribusi x

Σx^2 = Jumlah kuadrat pada masing-masing x

Σy^2 = Jumlah kuadrat pada masing-masing y

Tabel 5 Kriteria Uji Validitas

Corrected Item Total Correlation	Keterangan
$\geq 0,3$	Valid
$< 0,3$	Tidak Valid

Sumber : Sugiyono, 2013

Pengujian Reliabilitas

Azwar (1997) reliabilitas adalah sejumlah hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama.

$$r_{hitung} = \frac{k}{(k-1)} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S^2}\right)$$

r_{hitung} = Reliabilitas instrumen

k = banyaknya pertanyaan

$\sum S_i^2$ = Jumlah varian butir

S_i^2 = varian total

tabel 6 Kriteria Uji Reliabilitas

Alpha Cronbach	Keterangan
>0,6	Reliabel
<0,6	Tidak Reliabel

Sumber : Sugiyono, 2013

Uji Asumsi Klasik

Merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis regresi berganda dan untuk memenuhi karakter koefisien regresi yang linier, tidak bias, konsisten, serta efisien (memiliki varians yang minimum). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas.

Metode Analisis Data

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa teknik regresi linier berganda dipergunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variable bebas terhadap variable terikat, dan untuk memperkirakan arah meramalkan bagaimana perunahan nilai variable dependen, bila nilai variable independen dinaikan atau diturunkan nilainya.

Bentuk persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan dengan rumus berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pembayaran PBB

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Koefisien regresi tingkat pendapatan

X_2 = Koefisien regresi pengetahuan pajak

X_3 = Koefisien regresi kontrol petugas

kelurahan

ε = Error

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang dihasilkan kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel yang dibutuhkan.

Uji Hipotesis

1. Uji Statistik F

Uji Statistik F pada umumnya memperlihatkan apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat

a. Kriteria Keputusan Uji F

- 1) Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan kontrol petugas kelurahan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB.
- 2) Jika F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan dari F_{tabel} ($F_{hitung} \leq F_{tabel}$) ajakan, tingkat pendapatan dan pengetahuan P dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tingkat pendapatan dan Pengetahuan Pajak dan kontrol petugas kelurahan tidak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB.

2. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya melihat sejauh mana pengaruh satu variabel penjelas/independen secara terpisah untuk menjelaskan variasi variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Kota Bogor ialah sebuah daerah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada 59 km disamping selatan Jakarta, dan daerahnya terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Bogor. sebelumnya luas Kota Bogor 21,56 km², namun sekarang sudah

bertambah menjadi 118,50 km² dan total populasi 1.030.720 jiwa (2014). Bogor disebut atas predikat kota hujan, karena mempunyai curah hujan yang sangat besar. Kota bogor terdiri dari 6 Kecamatan dan dibagi lagi menjadi 68 Kelurahan. saat zaman Kolonial Belanda, Bogor disebut dengan sebutan *Buitenzorg* yang artinya “tanpa kecemasan” atau “aman tentram”. Hari peringatan untuk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dirayakan setiap tanggal 3 Juni, karena tanggal 3 Juni 1482 menjadi peristiwa penobatan Prabu Siliwangi selaku raja dari Kerajaan Pajajaran. Bogor sudah lama dikenal dengan pusat pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Disinilah beragam institusi dan balai pengkajian pertanian dan biologi berada mulai dari abad ke-19.

Berdasarkan jenis kelamin karakteristik wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat proporsi responden terbesar ialah yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 237 orang (59.25%), dan responden perempuan berjumlah 165 orang (41.25 %), dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian dari wajib pajak yang membayar PBB adalah laki-laki, karena pada umumnya kepemilikan bumi dan atau bangunan jika mereka suami istri maka atas nama suami.

Berdasarkan pendidikan terakhir, karakteristik wajib pajak menunjukkan responden yang terbesar adalah SMU, yakni sebanyak 197 orang (49.25%), posisi kedua yaitu tingkat pendidikan sarjana (S1) sebanyak 83 orang (20.75%), posisi ketiga yaitu jenjang pendidikan SD sebanyak 52 orang (13%), posisi keempat yaitu jenjang pendidikan DIII sebanyak 36 orang (9%), untuk posisi kelima yaitu jenjang pendidikan SMP sebanyak 17 orang (4.25%), kemudian posisi keenam yaitu jenjang pendidikan pascasarjana (S2) sebanyak 9 orang (2.25%), dan yang terkecil yakni responden yang tidak sekolah sebanyak 6 orang (1.5%).

berdasarkan pekerjaan, karakteristik wajib pajak bahwa mayoritas responden berprofesi sebagai karyawan swasta, yakni sebanyak 180 orang (45%), dan selebihnya

diikuti oleh Ibu Rumah Tangga, yakni sebanyak 119 orang (29.75%), Pegawai Negeri Sipil berjumlah 52 orang (13%), pengusaha sebanyak 35 orang (8.75%), dan jenis pekerjaan lain berjumlah 14 orang (3.5%). Adapun jenis pekerjaan lain-lain tersebut adalah buruh, supir dan serabutan.

Berdasarkan penghasilan, karakteristik wajib pajak diketahui bahwa mayoritas responden mempunyai penghasilan sebesar 2.000.000 – 2.999.900 berjumlah 102 orang (25.5%), kemudian diikuti dengan penghasilan sebesar 1.000.000 – 1.999.900 sebanyak 101 orang (25.25%), responden yang mempunyai penghasilan > 4.000.000 sebesar 79 orang (19.75%), responden yang mempunyai penghasilan 3.000.000 – 3.999.900 sebanyak 64 orang (16%), dan yang terakhir sedikit responden yang memiliki penghasilan > 1.000.000 berjumlah 54 orang (13.5%).

Berdasarkan rekapitulasi dari masing-masing responden, berikutnya akan dijelaskan rekapitulasi dari keseluruhan kriteria responden, ialah berikut :

Tabel 7 Rekapitulasi Karakteristik Responden

No	Kriteria Responden	Karakteristik	Jumlah/Orang
1	Jenis Kelamin	Laka-laki	237 (59,25%)
2	Pendidikan	SMA	197 (49,25%)
3	Pekerjaan	Karyawan Swasta	180 (45%)
4	Penghasilan	2.000.000 – 2.999.900	102 (25,5%)

Sumber : Data diolah 2017

Tingkat Pendapatan

Rekapitulasi skor tanggapan wajib pajak PBB P2 terhadap Tingkat Pendapatan adalah :

Tabel 8 Rekapitulasi Skor Tanggapan Variabel Tingkat Pendapatan

No	Pernyataan/ Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Bapak/ Ibu sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari	3,91	Setuju
2.	Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dapat mempermudah atau memperlancar pembayaran PBB	4,12	Setuju
3.	Bapak / Ibu menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk menabung	4,03	Setuju
Total		12,06	
Nilai Rata-rata		4,02	Setuju

Sumber : Data diolah 2017

Pengetahuan Pajak

Rekapitulasi skor tanggapan wajib pajak terhadap pengetahuan pajak adalah :

Tabel 9 Rekapitulasi Skor Tanggapan Variabel Pengetahuan Pajak

No	Pertanyaan/ Pernyataan	Jawaban	Keterangan
1.	PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, pekarangan, jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya	4,31	Sangat Setuju
2.	PBB merupakan salah satu sumber dana pembangunan di negara kita	4,17	Setuju
3.	Tempat ibadah, makam, hutan lindung, dan museum adalah objek pajak yang tidak dikenakan pajak	4,21	Sangat Setuju
4.	Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau kekuasaan atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan	4,18	Setuju
5.	Saya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar	4,13	Setuju
6.	Barang siapa melanggar undang-undang PBB akan dikenakan sanksi berupa denda administratif ataupun hukum penjara	3,80	Setuju
Total		24,8	
Nilai Rata-rata		4,13	Setuju

Sumber : Data diolah 2017

Kontrol Petugas Kelurahan

Rekapitulasi skor tanggapan wajib terhadap kontrol petugas kelurahan dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 10 Rekapitulasi Skor Tanggapan Variabel Kontrol Petugas Kelurahan

No	Pertanyaan/ Pernyataan	Jawaban	Keterangan
1.	Petugas kelurahan rutin dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak	3,85	Setuju
2.	Kontrol dari petugas kelurahan dapat menyadarkan wajib pajak dalam membayar PBB	3,92	Setuju
3.	Kontrol dari petugas kelurahan menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi kamauan wajib pajak untuk berlaku patuh	3,99	Setuju
4.	Melakukan tindakan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan	3,72	Setuju
Total		15.48	
Nilai Rata-rata		3,87	Setuju

Sumber : Data diolah 2017

Kepatuhan Wajib Pajak

Rekapitulasi skor tanggapan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah :

Tabel 11 Rekapitulasi Skor Tanggapan Variabel Kepatuhan Pembayaran PBB

No	Pernyataan / Perntanyaaan	Jawaban	Keterangan
1.	Saya selalu mengisi SPOP sesuai dengan jumlah kepemilikan bumi/bangunan	3,87	Setuju
2.	Saya selalu melaporkan informasi terbaru perihal kepemilikan bumi/bangunan kepada pemerintah	3,84	Setuju
3.	Saya selalu membayar pajak dengan tepat waktu	4,05	Setuju
4.	Saya selalu membayar pajak tanpa adanya paksaan	4,06	Setuju
5.	Saya memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar PBB, sehingga saya selalu membayar dengan tepat waktu	4,07	Setuju
6.	Saya membayar pajak dengan teratur sehingga saya tidak pernah memilki tunggakan	4,08	Setuju
7.	Saya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar	4,04	Setuju
Total		28.01	
Nilai Rata-rata		4,00	Setuju

Sumber : Data diolah 20

Pengujian Instrumen Uji Validitas

Validitas memperlihatkan sejauh mana instrumen berguna untuk menilai apa yang akan diukur. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan (item) yang berhubungan dengan tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan serta kepatuhan PBB di Kota Bogor.

Hasil perhitungan dengan signifikan diambil, kemudian dibandingkan nilai r_{hitung} dengan α sebesar 0,05 maka diperoleh hasil yang berhubungan dengan tingkat pendapatan, terdiri dari 3 (tiga) item, bersumber dari hasil uji validitas untuk variabel tingkat pendapatan (X_1) memiliki nilai $0,515 > 0,3$ dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pernyataan yang berkaitan pada pengetahuan pajak, terdiri dari 6 (enam) item, berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel pengetahuan pajak (X_2) memiliki nilai $0,546 > 0,3$ yang berarti valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pernyataan yang berkaitan dengan kontrol petugas kelurahan, terdiri dari 4 (empat) item, berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel kontrol petugas kelurahan (X_3) memiliki nilai $0,648 > 0,3$ dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dan pernyataan yang berhubungan dengan kepatuhan terdiri dari 7 (tujuh) item, berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel kepatuhan memiliki nilai $0,686 > 0,3$ dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari setiap pernyataan tentang tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, kontrol petugas kelurahan dan kepatuhan wajib pajak reliabilitasnya 0,913 dimana nilai tersebut diatas 0,6 sehingga semua pernyataan dikatakan reliabel.

Hasil dan Pembahasan

Analisis regresi linier berganda ialah hubungan secara linier variabel independen yang lebih dari dua dengan variabel dependen. Analisis ini untuk memperkirakan nilai variabel dari variabel dependen jika

hasil independen mengalami penurunan ataupun kenaikan dan untuk mendapati kenaikan arah hubungan positif atau negatif. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.360	1.503		.905	.366
TK PEND	.250	.113	.100	2.223	.027
PENG PAJ	.622	.068	.420	9.142	.000
KONTR PET	.528	.073	.349	7.277	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 20, 2017

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 1,360 + 0,250X_1 + 0,622X_2 + 0,528X_3 + \varepsilon$$

Interpretasi dari regresi tersebut ialah sebagai berikut:

- Hasil persamaan regresi tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 1,360, nilai tersebut mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas tingkat pendapatan, pengetahuan pajak serta kontrol petugas kelurahan bernilai 0, maka kepatuhan pembayaran PBB 1,360.
- Hasil persamaan regresi untuk variabel tingkat pendapatan sebesar 0,250. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan tingkat pendapatan sebanyak satu satuan, dengan asumsi pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan bernilai 0, maka menyebabkan meningkatnya kepatuhan pembayaran PBB sebesar 0,250.
- Hasil persamaan regresi untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,622. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan pengetahuan pajak sebanyak satu satuan, dengan asumsi variabel tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan bernilai 0, maka menyebabkan meningkatnya kepatuhan pembayaran PBB sebesar 0,622.

d. Hasil persamaan regresi untuk variabel kontrol petugas kelurahan sebesar 0,528. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap kontrol petugas kelurahan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel, tingkat pendapatan dan kontrol petugas kelurahan bernilai 0, maka menyebabkan meningkatnya kepatuhan pembayaran PBB sebesar 0,528.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase kontribusi pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan terhadap kepatuhan pembayaran PBB P2 di Kota Bogor. Besarnya hasil koefisien determinasi dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.736 ^a	.542	3.044	

a. Predictors: (Constant), KONTR PET, TK PEND, PENG PAJ
 b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 20,2017

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh angka R² (*R square*) sebesar 0,542 atau (54,2%). Tabel tersebut menjelaskan bahwa kontribusi tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan terhadap kepatuhan pembayaran PBB sebesar 54,2%, sedangkan sisanya 45,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

untuk menguji apakah variabel tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan terhadap kepatuhan pembayaran PBB P2 di Kota Bogor berpengaruh secara simultan, maka digunakan statistik uji f dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: β₁, β₂ = 0; Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran PBB.

H_a: β₁, β₂ ≠ 0 ; Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran PBB

Untuk menguji hipotesis statistik diatas digunakan statistik uji F yang diperoleh melalui tabel Analisis Varians (Anova) seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 14 Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3573.931	3	1191.310	128.552	.000 ^b
Residual	3021.088	326	9.267		
Total	6595.018	329			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN
 b. Predictors: (Constant), KONTR PET, TK PEND, PENG PAJ

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 200,2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 128,552, sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,394. Apabila Fhitung dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung > Ftabel (128,552 > 2,394) dengan nilai signifikan F sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Kondisi ini bermakna bahwa perpajakan, tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Kota Bogor.

Uji t

Dari perhitungan yang diperoleh hasil pengujian untuk pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan terhadap kepatuhan pembayaran PBB P2 di Kota Bogor dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 15 Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1.360	1.503		.905	.366
TK PEND	.250	.113	.100	2.223	.027
PENG PAJ	.622	.068	.420	9.142	.000
KONTR PET	.528	.073	.349	7.277	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN Coefficients

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 20,2017

Tingkat Pendapatan

Untuk melihat apakah terjadi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran PBB P2 di Kota Bogor, secara statistik akan analisis menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = 0$ Tingkat pendapatan, secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan pembayara PBB.

$H_a: \beta_1 \neq 0$ Tingkat pendapatan, secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk tingkat pendapatan sebesar 2,223, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,965. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,223 > 1,965$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,027 < 0,005$. Hal ini mengandung arti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan PBB di Kota Bogor.

Pengetahuan Pajak

Untuk melihat apakah terjadi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB P2 di Kota Bogor, secara statistik akan dianalisis menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_3 = 0$ Pengetahuan Pajak, secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan pembayaran PBB.

$H_a: \beta_3 \neq 0$ Pengetahuan Pajak, secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk pengetahuan pajak sebesar 9,142, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,965. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,142 > 1,965$) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan PBB di Kota Bogor.

Kontrol Petugas Kelurahan

Untuk melihat pengaruh kontrol petugas kelurahan terhadap kepatuhan pembayaran PBB P2 di Kota Bogor, secara statistik uji hipotesis berikut ini:

$H_0: \beta_4 = 0$ Kontrol Petugas Kelurahan secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB

$H_a: \beta_4 \neq 0$ Kontrol Petugas Kelurahan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB

Hasil pengujian menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk kontrol petugas kelurahan sebesar 7,277, sedangkan hasil t_{tabel} sebesar 1,965. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,277 > 1,965$) dengan tingkat signifikan signifikan $0,000 < 0,005$. Hal ini menjelaskan H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa kontrol petugas kelurahan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan PBB di Kota Bogor.

Kesimpulan

1. Karakteristik responden untuk penelitian ini lebih banyak ialah laki-laki 237 orang dengan derajat pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta dan penghasilan kisaran 2.000.000 – 2.999.900.
2. Tingkat pendapatan, Pengetahuan pajak serta kontrol petugas kelurahan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan PBB di Kota Bogor
3. Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan PBB di Kota Bogor.
4. Besarnya kontribusi pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan pajak & kontrol petugas kelurahan yaitu sebesar 54,2%. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006, **Perpajakan: Konsep, teori dan Isu**, : Kencana , Jakarta.
- Kertika, D., Setiawan, A.B., Kusuma, I, 2016, **Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi**, *Jurnal Akunida*, Vol. 7 (2), Hal. 143-151
- Mardiasmo., 2011, *Perpajakan*, Edisi revisi, Yogyakarta
- Oktaliana, Fanie, 2009, **Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan**, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. **Perpajakan Indonesia**. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. **Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal**. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Resmi, Siti .2005. **Pepajakan Teori dan Kasus**. Salemba Empat, Jakarta
- Rosdiana, Haula. 2003. **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**. Pusat kajian Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Depok:
- Saptono, Bambang Suteng. 2006. **Sosiologi untuk SMA Kelas X**. Jakarta : Phibeta
- Simanjuntak, Elizabeth. 2008. **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak**. Skripsi. Yogyakarta : FE UGM.
- Soedibjo, Bambang S., 2004. **Pengantar Metode Penelitian**, Edisi Revisi, jurusan Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, Bandung
- Soemitro, Rochmat. 1987. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Eresco
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Manajemen**. Alfabeta, Bandung
- Supardi. 2014. **Aplikasi Statistik dalam Penelitian**. Jakarta : Change Publication